

Peningkatan Kualitas Kampung Kota Dan Dampaknya Terhadap Masyarakat (Studi Kasus: Kampung Pelangi 200)

Alya Rihadatul Aisy¹, Aoliya Fauziyah², Bunga Assipa Wulandari³, Fidela Zaneta Utomo⁴, Maisya Dahayu Fathihanis⁵

^{1, 2, 3, 4, 5} Program Sarjana Arsitektur, Universitas Pendidikan Indonesia

¹alayaraiissy@upi.edu, ²aoliya_fauziyah@ip.edu,

³bungaassipa@upi.edu, ⁴fidelazann@upi.edu, ⁵maiisyyaaa@upi.edu

Abstract. Urban villages play a crucial role in the context of sustainable development, functioning as the community's answer to housing needs in the urban environment. However, urban villages are often faced with various challenges including high population density, slum conditions, and lack of adequate infrastructure facilities. In the case study of Kampung Pelangi 200 in Bandung, the character of the village environment was analyzed along with the identification of lack of facilities and the formulation of necessary improvement strategies. Through qualitative research methods involving direct data collection and literature review. The aim of this research is to improve the quality of life of the people in the village, with a focus on providing and improving infrastructure and facilities that suit their needs. Findings show that the village experiences high population density and lacks facilities such as access and parking. It is hoped that the results of this research will provide a better perspective in designing sustainable development strategies in the future, by emphasizing the importance of improving infrastructure and improving the quality of life in urban villages as an integral part of the sustainable development process.

Keywords: urban villages, sustainable development, population density, slum conditions, infrastructure deficiencies.

Abstrak. Kampung kota memegang peran krusial dalam konteks pembangunan berkelanjutan, berfungsi sebagai jawaban dari masyarakat terhadap kebutuhan perumahan di lingkungan perkotaan. Namun, seringkali kampung kota dihadapkan pada berbagai tantangan yang meliputi kepadatan penduduk yang tinggi, kondisi kekumuhan, dan kekurangan fasilitas infrastruktur yang memadai. Dalam studi kasus Kampung Pelangi 200 di Bandung, karakter lingkungan kampung dianalisis bersama dengan identifikasi kekurangan fasilitas serta perumusan strategi perbaikan yang diperlukan. Melalui metode penelitian kualitatif yang melibatkan

pengumpulan data langsung dan tinjauan literatur. Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di kampung tersebut, dengan fokus pada penyediaan dan peningkatan infrastruktur serta fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan. Temuan menunjukkan bahwa kampung tersebut mengalami kepadatan penduduk yang tinggi dan kekurangan fasilitas seperti akses masuk dan tempat parkir. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan yang lebih baik dalam merancang strategi pembangunan berkelanjutan di masa depan, dengan menekankan pentingnya perbaikan infrastruktur dan peningkatan kualitas hidup di kampung kota sebagai bagian integral dari proses pembangunan yang berkelanjutan.

Kata kunci: kampung kota, pembangunan berkelanjutan, kepadatan penduduk, kekumuhan, perbaikan fasilitas.

1. Latar Belakang

Kampung merupakan salah satu pemukiman manusia di perkotaan yang dapat digambarkan sebagai perumahan tradisional sebelum perencanaan pemukiman modern yang melekat pada kota-kota di Indonesia [7]. Kampung kota memiliki peran yang penting terhadap pembangunan berkelanjutan [1]. Kampung kota terbentuk sebagai respon masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan akan hunian [5]. Telah dijelaskan bahwa dari strategi fisik, sebagian dari area kampung telah identik dengan kepadatan yang tinggi dan kekumuhan [5]. Sebagian kampung kota merupakan kawasan pemukiman yang kumuh, dimana memiliki karakteristik kondisi lingkungan yang tidak memenuhi syarat kesehatan baik dalam sarana prasarana ataupun utilitasnya, bangunan yang ada berada dalam kondisi yang buruk atau material yang digunakan tidak bersifat permanen, KDB yang digunakan lebih besar daripada standar pada aturan yang tertulis, fungsi bangunan yang tercampur dan dibangun secara ilegal [8].

Dilihat dari sistem sosialnya, kampung kota merupakan suatu sistem sosial kompleks yang dihuni oleh penduduk perkotaan yang memiliki latar belakang agama, pendapatan, pendidikan, pekerjaan, etnis, bahkan politik yang berbeda-beda [5]. Dari sudut pandang perekonomian, kampung kota merupakan sistem perekonomian yang sangat dinamis, dimana berbagai kegiatan usaha produktif penduduknya menunjang kegiatan perekonomian kota [6]. Pada saat yang sama, tidak dapat dipungkiri bahwa pembangunan kampung kota sarat dengan berbagai permasalahan, seperti kurangnya sarana dan prasarana yang memadai. Daerah-daerah tersebut berpenduduk kurang produktif, begitu pula dengan legalitas tanah yang status dan kepemilikannya tidak jelas [8].

Menurut Lynch (1981) untuk membangun sebuah tempat yang baik juga ideal terdapat beberapa poin yaitu dimensi vitality, senses, fit, access, control, efficiency dan justice. Tempat yang baik ataupun ideal tidak dilihat hanya dari kondisi fisiknya, ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan untuk dapat membentuk tempat yang baik [2]. Pada studi kasus Kampung Pelangi 200, permasalahan yang terjadi adalah kurangnya fasilitas yang dapat menunjang kebutuhan hidup masyarakatnya, akses jalan yang ada pun masih terbatas mengingat kebutuhan masyarakat akan kendaraan bermotor yang tinggi namun tempat yang tersedia sangat terbatas baik untuk akses masuk ataupun parkir. Tingkat kenyamanan juga sirkulasi antar bangunan menjadi poin penting untuk diperhatikan, dimana terdapat beberapa jalan yang keamanannya masih kurang untuk digunakan baik kendaraan bermotor ataupun pejalan kaki [10].

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mencari sebuah strategi peningkatan kualitas kampung kota demi keberlangsungan kehidupan masyarakat Kampung Pelangi 200 yang lebih baik kedepannya. Sasaran yang ingin dituju dari penelitian ini adalah: (1) Teridentifikasinya

karakter lingkungan Kampung Pelangi 200, (2) Teridentifikasinya kekurangan fasilitas dan kenyamanan Kampung Pelangi 200 bagi masyarakat, dan (3) Strategi perbaikan fasilitas Kampung Pelangi 200 [9].

2. Tinjauan Pustaka dan Landasan Teori

2.1. Terminologi Kampung Kota

Istilah "kampung," yang berasal dari bahasa Melayu, awalnya merujuk pada permukiman perdesaan dan sering digunakan untuk membedakan antara desa dan kota, di mana kota diidentikkan dengan kemajuan, sedangkan kampung dengan keterbelakangan [11]. Pembentukan kampung sudah berlangsung lama, sejak era Hindia Belanda, awalnya sebagai kawasan permukiman pribumi di wilayah perkotaan kolonial.

Menurut Widjaja dalam penelitiannya [11], perkembangan kampung di Indonesia turut dipengaruhi oleh budaya dan tatanan kehidupan yang diperkenalkan kaum kolonial, yang juga membentuk perkembangan kota di Indonesia. Meskipun sering diasosiasikan secara negatif, kampung memiliki peran, potensi, dan karakter khas. Saat ini, kampung menampung mayoritas penduduk perkotaan, menguasai 70-85% lahan di kota-kota Indonesia, sedangkan perumahan formal hanya memenuhi sekitar 15% kebutuhan [8].

Lebih dari sekadar lingkungan fisik, kampung adalah sistem sosial yang dinamis dan beragam, dengan warga yang berbeda agama, latar belakang, pekerjaan, dan etnis. Kampung menciptakan ruang untuk nilai-nilai keragaman, toleransi, dan kebersamaan.

Seiring waktu, istilah "kampung" juga digunakan untuk menggambarkan permukiman swadaya di perkotaan, yang disebut "kampung kota." Dalam kajian ini, kampung kota didefinisikan sebagai permukiman di perkotaan yang terbentuk spontan untuk memenuhi kebutuhan hunian, dengan ciri tradisional dan umumnya kurang memiliki fasilitas yang memadai.

2.2. Sasaran dan Upaya Peningkatan Kualitas Kampung Kota

Sasaran peningkatan kualitas kampung kota adalah fasilitas dasar yang memadai seperti menyediakan akses ke air bersih, sanitasi, jalan, dan listrik bagi seluruh warga kampung kota (Sustainable Development Goals); perbaikan kualitas hunian yang aman, nyaman, serta layak dihuni (Peraturan Menteri PUPR No. 05/PRT/M/2016); penguatan perekonomian lokal yang meningkatkan kemandirian dan kestabilan ekonomi masyarakat (SDGs 8); pengurangan kepadatan dan peningkatan tata ruang kampung kota (SDGs 11); Penguatan sosial dan komunitas yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang inklusif, aman, dan berdaya bagi semua kelompok masyarakat (SDGs 10 dan SDGs11).

Dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas kampung kota, dibutuhkan upaya dan strategi berikut (Sustainable Development Goals), yaitu mengoptimalkan jaringan air bersih, menyediakan sarana sanitasi dan pengelolaan sampah yang memadai, memperbaiki jalan setapak atau aksesibilitas untuk kendaraan darurat, dan meningkatkan penerangan. Selain itu, dalam peraturan Menteri PUPR No. 05/PRT/M/2016 dan UN Habitat, diperlukan juga Renovasi atau perbaikan struktur bangunan yang berisiko, penyediaan material bangunan tahan cuaca dan bencana, serta pengaturan zonasi untuk mencegah kepadatan yang berlebihan.

UN Habitat juga mengatur strategi dalam rannah ekonomi yaitu dengan melakukan pelatihan kewirausahaan, penyediaan akses ke kredit mikro, pengembangan pusat ekonomi lokal, dan peningkatan keterampilan berbasis komunitas. Upaya dalam meningkatkan tata ruang kota yang dicetuskan oleh UN Habitat yaitu diantaranya merelokasi bagi warga yang tinggal di area rawan bencana, penataan ulang tata ruang agar lebih efisien, dan peningkatan ruang hijau. Selanjutnya dalam bidang sosial dan komunitas, strategi yang dapat dilakukan yaitu berupa pengembangan program pemberdayaan komunitas, peningkatan fasilitas kesehatan dan pendidikan, serta pembinaan warga untuk menguatkan kohesi sosial.

2.3. Standar Kepadatan Penduduk

Untuk memenuhi sasaran dan melaksanakan strategi tersebut, diperlukan standar yang akan dijadikan acuan. Untuk kepadatan penduduk mengacu pada Standar Nasional Indonesia nomor 03-1733-2004 tentang Tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan.

Tabel 1. Faktor reduksi kebutuhan lahan untuk sarana lingkungan berdasarkan kepadatan penduduk

Klasifikasi Kawasan	Kepadatan			
	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Padat
Kepadatan penduduk	< 150 jiwa/ha	151 – 200 jiwa/ha	201 – 400 jiwa/ha	> 400 jiwa/ha
Reduksi terhadap kebutuhan lahan	-	-	15% (maksimal)	30% (maksimal)

(Sumber: SNI 03-1733-2004)

2.4. Standar Fasilitas Umum dan Sosial

Fasilitas umum dan sosial pada suatu wilayah mengacu pada Standar Nasional Indonesia nomor 03-1733-2004 tentang Tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan yang sudah dilengkapi dengan jumlah dan luas fasilitas sebagai dasar untuk menganalisis pernyataan.

Tabel 2. Kebutuhan sarana pemerintahan dan pelayanan umum

No.	Jenis Sarana	Jumlah Penduduk pendukung (jiwa)	Kebutuhan Per Satuan Sarana		Standard (m ² /jiwa)	Kriteria		
			Luas Lantai Min. (m ²)	Luas Lahan Min. (m ²)		Radius pencapaian	Lokasi dan Penyelesaian	
1.	Balai pertemuan	R W	2.500	150	300	0,12	Di tengah kelompok bangunan hunian warga, ataupun di akses keluar/masuk dari kelompok bangunan. Dapat berintegrasi dengan bangunan sarana yang lain. Lokasi dan bangunannya harus mempertimbangkan keamanan dan kenyamanan sekitar. Lokasinya disebar pada titik-titik strategis atau di sekitar pusat lingkungan. Dilokasikan dapat melayani kebutuhan bangunan sarana kebudayaan dan rekreasi lain berupa balai pertemuan warga.	
2.	pos hansip		2.500	6	12	0,06		500 m'
3.	gardu listrik		2.500	20	30	0,012		500 m'
4.	telepon umum, bis surat		2.500	-	30	0,012		500 m'
5.	parkir umum		2.500	-	100	0,04		

(Sumber: SNI 03-1733-2004)

Tabel 3. Kebutuhan sarana pendidikan dan pembelajaran

No.	Jenis Sarana	Jumlah Penduduk pendukung (jiwa)	Kebutuhan Per Satuan Sarana		Standard (m ² /jiwa)	Kriteria		Keterangan
			Luas Lantai Min. (m ²)	Luas Lahan Min. (m ²)		Radius pencapaian	Lokasi dan Penyelesaian	
1.	Taman Kanak-kanak	1.250	216 termasuk rumah penjaga 36 m ²	500	0,28 m ² /j	500 m'	Di tengah kelompok warga. Tidak menyeberang jalan raya. Bergabung dengan taman sehingga terjadi pengelompokan kegiatan.	2 rombongan prabelajar @ 60 murid dapat bersatu dengan sarana lain
2.	Sekolah Dasar	1.600	633	2.000	1,25	1.000 m'	Dapat dijangkau dengan kendaraan umum. Disatukan dengan lapangan olah raga. Tidak selalu harus di pusat lingkungan.	Kebutuhan harus berdasarkan perhitungan dengan rumus 2, 3 dan 4. Dapat digabung dengan sarana pendidikan lain, mis. SD, SMP, SMA dalam satu kompleks
3.	SLTP	4.800	2.282	9.000	1,88	1.000 m'		
4.	SMU	4.800	3.835	12.500	2,6	3.000 m'		
5.	Taman Bacaan	2.500	72	150	0,09	1.000 m'	Di tengah kelompok warga tidak menyeberang jalan lingkungan.	

(Sumber: SNI 03-1733-2004)

Tabel 4. Kebutuhan sarana Kesehatan

No.	Jenis Sarana	Jumlah Penduduk pendukung (jiwa)	Kebutuhan Per Satuan Sarana		Standard (m ² /jiwa)	Kriteria		Keterangan
			Luas Lantai Min. (m ²)	Luas Lahan Min. (m ²)		Radius pencapaian	Lokasi dan Penyelesaian	
1.	Posyandu	1.250	36	60	0,048	500	Di tengah kelompok tetangga tidak menyeberang jalan raya.	Dapat bergabung dengan balai warga atau sarana hunian/rumah
2.	Balai Pengobatan Warga	2.500	150	300	0,12	1.000 m'	Di tengah kelompok tetangga tidak menyeberang jalan raya.	Dapat bergabung dalam lokasi balai warga
3.	BKIA / Klinik Bersalin	30.000	1.500	3.000	0,1	4.000 m'	Dapat dijangkau dengan kendaraan umum	
4.	Puskesmas Pembantu dan Balai Pengobatan Lingkungan	30.000	150	300	0,006	1.500 m'	-idem-	Dapat bergabung dalam lokasi kantor kelurahan
5.	Puskesmas dan Balai Pengobatan	120.000	420	1.000	0,008	3.000 m'	-idem-	Dapat bergabung dalam lokasi kantor kecamatan
6.	Tempat Praktek Dokter	5.000	18	-	-	1.500 m'	-idem-	Dapat bersatu dengan rumah tinggal/tempat usaha/apotik
7.	Apotik / Rumah Obat	30.000	120	250	0,025	1.500 m'	-idem-	

(Sumber: SNI 03-1733-2004)

Tabel 5. Kebutuhan sarana peribadatan

No.	Jenis Sarana	Jumlah Penduduk pendukung (jiwa)	Kebutuhan Per Satuan Sarana		Standard (m ² /jiwa)	Kriteria	
			Luas Lantai Min. (m ²)	Luas Lahan Min. (m ²)		Radius pencapaian	Lokasi dan Penyelesaian
1.	Musholla/ Langgar	250	45	100 bila bangunan tersendiri	0,36	100 m'	Di tengah kelompok tetangga. Dapat merupakan bagian dari bangunan sarana lain
2.	Mesjid Warga	2.500	300	600	0,24	1.000 m'	Di tengah kelompok tetangga tidak menyeberang jalan raya. Dapat bergabung dalam lokasi balai warga.
3.	Mesjid Lingkungan (Kelurahan)	30.000	1.800	3.600	0,12		Dapat dijangkau dengan kendaraan umum
4.	Mesjid Kecamatan	120.000	3.600	5.400	0,03		Berdekatan dengan pusat lingkungan / kelurahan. Sebagian sarana berlantai 2, KDB 40%
5.	Sarana ibadah agama lain	Tergantung sistem kekerabatan / hirarki lembaga	Tergantung kebiasaan setempat	Tergantung kebiasaan setempat	-	-	-

(Sumber: SNI 03-1733-2004)

Tabel 6. Jenis sarana perdagangan dan niaga

No.	Jenis Sarana	Jumlah Penduduk pendukung (jiwa)	Kebutuhan Per Satuan Sarana		Standard (m ² /jiwa)	Kriteria	
			Luas Lantai Min. (m ²)	Luas Lahan Min. (m ²)		Radius pencapaian	Lokasi dan Penyelesaian
1.	Toko / Warung	250	50 (termasuk gudang)	100 (bila berdiri sendiri)	0,4	300 m'	Di tengah kelompok tetangga. Dapat merupakan bagian dari sarana lain
2.	Pertokoan	6.000	1.200	3.000	0,5	2.000 m'	Di pusat kegiatan sub lingkungan. KDB 40% Dapat berbentuk P&D
3.	Pusat Pertokoan + Pasar Lingkungan	30.000	13.500	10.000	0,33		Dapat dijangkau dengan kendaraan umum
4.	Pusat Perbelanjaan dan Niaga (toko + pasar + bank + kantor)	120.000	36.000	36.000	0,3		Terletak di jalan utama. Termasuk sarana parkir sesuai ketentuan setempat

(Sumber: SNI 03-1733-2004)

Tabel 7. Kebutuhan sarana kebudayaan dan rekreasi

No.	Jenis Sarana	Jumlah Penduduk pendukung (jiwa)	Kebutuhan Per Satuan Sarana		Standard (m ² /jiwa)	Kriteria	
			Luas Lantai Min. (m ²)	Luas Lahan Min. (m ²)		Radius pencapaian	Lokasi dan Penyelesaian
1.	Balai Warga/ Balai Pertemuan	2.500	150	300	0,12	100 m'	Di tengah kelompok tetangga. Dapat merupakan bagian dari bangunan sarana lain
2.	Balai Serbaguna / Balai Karang Taruna	30.000	250	500	0,017	100 m'	Di pusat lingkungan.
3.	Gedung Serbaguna	120.000	1.500	3.000	0,025	100 m'	Dapat dijangkau dengan kendaraan umum
4.	Gedung Bioskop	120.000	1.000	2.000	0,017	100 m'	Terletak di jalan utama. Dapat merupakan bagian dari pusat perbelanjaan

(Sumber: SNI 03-1733-2004)

Tabel 8. Sarana ruang terbuka, taman dan lapangan olahraga

No.	Jenis Sarana	Jumlah Penduduk pendukung (jiwa)	Kebutuhan Luas Lahan Min. (m ²)	Standard (m ² /jiwa)	Radius pencapaian (m)	Kriteria Lokasi dan Penyelesaian
1.	Taman /Tempat Main	250	250	1	100	Di tengah kelompok tetangga.
2.	Taman/ Tempat Main	2.500	1.250	0,5	1.000	Di pusat kegiatan lingkungan.
3.	Taman dan Lapangan Olah Raga	30.000	9.000	0,3		Sedapat mungkin berkelompok dengan sarana pendidikan.
4.	Taman dan Lapangan Olah Raga	120.000	24.000	0,2		Terletak di jalan utama. Sedapat mungkin berkelompok dengan sarana pendidikan.
5.	Jalur Hijau	-	-	15 m		Terletak menyebar.
6.	Kuburan / Pemakaman Umum	120.000				Mempertimbangkan radius pencapaian dan area yang dilayani.

(Sumber: SNI 03-1733-2004)

2.5. Standar Tingkat Pendidikan

Standar tingkat pendidikan berdasarkan SNI Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan menekankan bahwa penyediaan sarana pendidikan di suatu wilayah harus mempertimbangkan unit administratif baik informal maupun formal. Desain penyebaran sarana pendidikan juga perlu menyesuaikan konteks lingkungan setempat, baik dalam bentuk blok bangunan maupun radius layanan, agar fasilitas pendidikan ini mudah diakses oleh masyarakat. Perencanaan ini harus fokus pada tujuan pendidikan dengan menyediakan ruang yang mendukung

pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap siswa secara maksimal. Selain itu, perencanaan pendidikan perlu memperhatikan jumlah anak, kapasitas daya tampung dan juga efisiensi ruang.

Jenis sarana pendidikan yang perlu disediakan mencakup Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Umum (SMU). Selain sekolah formal, sarana tambahan seperti perpustakaan umum lingkungan bisa menjadi fasilitas pendukung untuk meningkatkan minat baca dan sebagai media rekreasi edukatif. Kebutuhan ruang dan lahan untuk masing-masing sarana ditentukan berdasarkan tipe sekolah, jumlah siswa, serta proyeksi pertumbuhan, dan harus diselesaikan dengan standar SNI untuk efisien.

2.6. Dampak Peningkatan Kualitas Kampung Kota terhadap Masyarakat

Strategi peningkatan kualitas kampung kota memiliki hubungan yang erat dengan dampaknya pada masyarakat, terutama dalam hal peningkatan kesejahteraan, kesehatan, dan stabilitas ekonomi. Strategi yang tepat dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih layak huni, meningkatkan kualitas hidup, dan membangun komunitas yang lebih inklusif [5].

3. Metode Penelitian

3.1. Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif yang bertujuan untuk memahami fenomena dalam konteks alami dengan menekankan interpretasi, pemahaman mendalam, dan deskripsi yang detail. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah studi kasus di Kampung Pelangi 200, Bandung. Data dikumpulkan melalui observasi langsung dan studi literatur. Data yang didapat berupa struktur bangunan, kondisi infrastruktur, kegiatan penduduk, kondisi lingkungan, kondisi ekonomi, interaksi sosial, aspek budaya dan tradisi, dan penggunaan ruang yang akan dijelaskan lebih lanjut pada bagian hasil dan pembahasan.

3.2. Analisis Data

Hasil data yang didapatkan dianalisis dengan metode SWOT, melalui evaluasi keandalan, validitas, dan relevansi dari sumber literatur yang digunakan. Informasi yang didapatkan, didukung oleh dokumentasi dari pengamatan langsung dan akan dimanfaatkan untuk menggambarkan kondisi eksisting Kampung Pelangi 20.

3.3. Alasan Memilih Kampung Pelangi 200

Kampung ini menjadi representasi ideal dari upaya transformasi kampung kota karena memiliki karakteristik unik berupa konsep pewarnaan dan estetika yang khas, serta lokasinya yang strategis di tengah kota Bandung. Proses perubahannya dari kampung biasa menjadi destinasi wisata menunjukkan adanya perencanaan yang matang dalam penataan lingkungan dan infrastruktur, dengan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat setempat. Ketersediaan data yang komprehensif, baik sebelum maupun sesudah program peningkatan kualitas, memungkinkan dilakukannya analisis perbandingan yang terukur untuk menilai dampak sosial-ekonomi terhadap masyarakat. Dampak positif yang terlihat meliputi peningkatan potensi ekonomi melalui aktivitas pariwisata dan terciptanya ruang interaksi sosial yang lebih baik. Dengan demikian, Kampung Pelangi 200 dapat menjadi model pengembangan kampung kota yang berkelanjutan dan memberikan pembelajaran berharga bagi upaya peningkatan kualitas kampung kota lainnya.

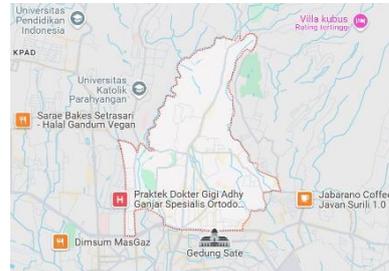
4. Pembahasan

4.1. Kampung Pelangi 200, Bandung

a) Lokasi



Gambar 1. Peta Kota Bandung
(Sumber: Google Maps)



Gambar 2. Peta Kec. Coblong
(Sumber: Google Maps)



Gambar 3. Peta Kampung Pelangi 200
(Sumber: Fatimah, 2020)

Desa Kampung Pelangi 200 terletak di Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong (Gambar 2), Bandung (Gambar 1), Jawa Barat. Desa seluas 2,09 hektar ini berada di sepanjang bagian atas Sungai Cikapundung, dekat dengan Teras Cikapundung (Gambar 3). Desa ini dibangun di area curam di tepi sungai, dengan rumah-rumah yang tampaknya bertumpuk satu sama lain. Ada dua jalur untuk masuk ke desa ini: satu melalui trotoar tepat di sebelah Riverspot Cikapundung, sementara yang lainnya melewati trotoar dari Jalan Sangkuriang (Gambar 4). Jalur pertama biasanya lebih digunakan karena dirancang dengan estetika yang menarik, sementara jalur kedua kurang umum digunakan karena terletak di sekitar perumahan, bukan di jalan utama. Trotoar ini dibangun bersamaan dengan pembangunan Riverspot Cikapundung antara tahun 2013 dan 2015.

b) Data Penduduk

Kepadatan penduduk di Kampung Pelangi 200 mencapai 887 jiwa per hektar, yang termasuk klasifikasi kepadatan penduduk sangat tinggi berdasarkan SNI 03-1733-2004. Hal ini dikarenakan sebagian besar penduduk Kampung Pelangi 200 mewarisi tempat tinggal mereka dari generasi sebelumnya, sehingga satu rumah sering kali dihuni oleh tiga hingga empat Kartu Keluarga (KK). Pada akhir tahun 2023, jumlah Kepala keluarganya diperkirakan mencapai 300 [4]. Kampung Pelangi 200 terbagi menjadi 4 Rukun Tetangga (RT) yaitu RT 3, 4, 10, dan 11.

Terdapat sekitar 135 KK di RT 4 dan 10, serta 90 KK di RT 3 dan 11 [3].



Gambar 4. Pembagian RT di Kampung Pelangi 200 (Sumber: Fatimah, 2020)

c) Fasilitas Umum dan Sosial

Berdasarkan hasil observasi langsung, terdapat fasilitas umum terdekat yang sudah memadai aktivitas penduduk di Desa Kampung Pelangi 200 dan sekitarnya, diantaranya:

 <p>Jl. Raya Siliwangi (Sumber: Google Street View, 2024)</p>	 <p>Pasar Gandok (Sumber: Google Maps, 2024)</p>	 <p>Puskesmas Dago (Sumber: Google Street View, 2024)</p>
 <p>Masjid Ar-Royan (Sumber: Google Maps, 2024)</p>	 <p>SD Advent (Sumber: Google Maps, 2024)</p>	 <p>Hutan Kota (Sumber: Google Maps, 2024)</p>

d) Manusia dan Budaya

Kampung Pelangi 200 memiliki jalan yang bagus dan juga banyak pohon rindang sehingga masyarakat kampung ini sering berjalan kaki. Kondisi ini mendukung lingkungan yang ramah bagi pejalan kaki. Tidak hanya itu, kepadatan permukiman membuat rumah-rumah di kampung ini berdekatan. Karena jarak yang dekat, warga sering bertemu dan berinteraksi satu sama lain. Hal ini menciptakan suasana kampung yang hangat dan kekeluargaan.

Tingkat pendidikan penduduk di desa Kampung Pelangi 200 tergolong rendah. Keterbatasan akses terhadap pendidikan juga tercermin dalam jenis dan variasi pekerjaan yang ada di antara penduduknya. Menurut SNI Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan, fasilitas pendidikan yang memadai dan mudah diakses sebagai elemen vital dalam meningkatkan kualitas hidup di suatu lingkungan perumahan merupakan standar pendidikan di suatu kota. Namun, di Kampung Pelangi 200, keterbatasan akses terhadap sarana pendidikan menyebabkan penduduk sulit untuk mencapai tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Hal ini berdampak langsung pada jenis dan variasi pekerjaan yang tersedia, di mana sebagian besar laki-laki bekerja sebagai pegawai negeri, dan perempuan cenderung menganggur, bekerja sebagai pembantu rumah tangga atau menjalankan usaha kecil di rumah. Masalah tersebut juga berdampak pada perekonomian di Kampung Pelangi 200. Berdasarkan survei, 80% dari responden dapat dikategorikan sebagai bagian dari kelas menengah, namun cenderung berada di tingkat hampir miskin. Ini menunjukkan fluktuasi pendapatan dan tingkat kerentanan yang tinggi. Sementara itu, 20% sisanya termasuk dalam kelas menengah ke atas [3].

4.2. Preseden

 <p>(Sumber: Indoindians.com)</p>	<p>Perbaikan Infrastruktur Kampung Warna- Warni Jodipan, Malang</p> <p>Memperbaiki infrastruktur dengan mengecat ulang atau memberikan lukisan pada bagian jalan dan dinding rumah serta menambahkan aksesoris seperti payung warna-warni dan topi caping yang sudah dilukis untuk spot foto para wisatawan agar kawasan terlihat lebih hidup.</p>
 <p>(Sumber: Tribunnews)</p>	<p>Menjual Aksesoris khas Kampung Warna-Warni Jodipan, Malang</p> <p>Melatih kreativitas warga dengan cara menjual aksesoris khas kampung tersebut dan wisatawan dapat mengingat kampung tersebut dengan membeli oleh-oleh aksesoris ini.</p>
 <p>(Sumber: Lifestyle.kontan)</p>	<p>Melatih Kreativitas Warga Kampung Warna-Warni dengan Membuat Ornamen dan Mural</p> <p>Ornamen dan mural ini dapat melatih kreativitas warga kampung. Tidak hanya itu, ornamen dan mural di kampung ini dijadikan sebagai spot foto wisatawan.</p>
 <p>(Sumber: Instagram @PMM_Tematik_KWJ)</p>	<p>Promosi Menggunakan Sosial Media Untuk Menarik Wisatawan</p> <p>Setelah membuat spot foto menarik, masyarakat dibantu dengan tim pelaksana mempromosikan foto-foto yang dapat menarik wisatawan. Konten yang diunggah melalui sosial media tim pelaksana mengundang banyak pertanyaan mengenai Kampung Warna Warni Jodipan, dan pertanyaan tersebut dijawab dengan jelas dan ramah. Jawaban-jawaban tersebut dapat mempersuasi wisatawan untuk datang ke Kampung Warna Warni Jodipan, Malang.</p>
 <p>(Sumber: www.tilytravels.com)</p>	<p>Edukasi Masyarakat Mengenai Kesehatan Lingkungan Kampung Pelangi, Semarang</p> <p>Menyediakan edukasi untuk masyarakat mengenai kebersihan lingkungan. Contohnya dengan mendaur ulang ban bekas sebagai pot tanaman dan menyediakan wastafel di beberapa titik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk selalu menjaga kebersihan.</p>

4.3. Analisis SWOT dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Kampung Pelangi 200

Berikut adalah potensi serta kendala pada Kampung Pelangi 200 berdasarkan hasil observasi. Potensi dan kendala tersebut adalah faktor internal yang kemudian dapat dikaji untuk strategi proses peningkatan kualitas kawasan tersebut.

a.) Potensi/Kekuatan

1.	Kebersamaan dan tingkat gotong royong di masyarakat cukup tinggi.	Masyarakat Kampung Pelangi 200 menjalin hubungan yang baik satu sama lain, dimana sesama masyarakat saling membantu sama lain dan bertegur sapa setiap berpapasan.
2.	Tidak adanya potensi terjadinya konflik sosial.	Masyarakat yang hidup berdampingan dan saling tolong menolong satu sama lain, sangat minim kemungkinan terjadinya suatu konflik karena rasa kekeluargaan yang sudah melekat.
3.	Adanya peluang untuk berwirausaha atau berdagang di Kampung Kota Pelangi 200.	Banyaknya wisatawan yang mengunjungi Kampung Pelangi 200 bisa menjadi potensi wirausaha seperti membuka kedai makanan, berjualan aksesoris, ataupun menjual jasa.
4.	Daya tarik wisatawan yang cukup tinggi.	Dengan lokasi yang strategis dan nyaman, banyak orang yang berkunjung ke Kampung Pelangi 200 untuk sekedar jogging ataupun melihat-lihat keindahan.
5.	Tingkat kebersihan lingkungan cukup baik.	Meskipun termasuk kedalam pemukiman padat, lingkungan di Kampung Pelangi 200 termasuk lingkungan yang terjaga kebersihannya, terlihat dari setiap rumah warga yang baik dalam mengelola sampah.
6.	Pengelolaan sampah mulai berkembang dengan adanya budidaya maggot.	Budidaya maggot yang berasal dari limbah warga bisa menjadi peluang usaha baru untuk dikembangkan dan dapat memajukan ekonomi para warga Kampung Pelangi 200.
7.	Tingkat kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan sudah cukup baik, mengingat sudah jarang yang membuang sampah ke sungai.	Sepanjang Kampung Pelangi 200, masyarakat sudah mengerti pentingnya membuang sampah kepada tempatnya sehingga dari sampah itu sendiri dapat menghasilkan sebuah usaha baru.

b) Kendala/Kelemahan

1.	Tidak terpenuhinya GSB (Garis sempadan bangunan), hampir semua bangunan berdempetan.	Lahan yang terbatas dan tingginya jumlah penduduk menyebabkan beberapa peraturan terkait pembangunan tidak terpenuhi oleh masyarakat Kampung Pelangi 200.
2.	Tingginya KLB sehingga KDH atau daerah resapan air hujan di Kampung Pelangi 200 kurang mencukupi.	Kurangnya daerah resapan air membuat kurang efektifnya penyerapan air hujan sehingga masyarakat memanfaatkan saluran yang berakhir ke sungai sebagai penyaluran air hujan.
3.	Masih banyak bangunan atau rumah yang kumuh.	Lingkungan Kampung Pelangi 200 yang terbilang cukup bersih, namun beberapa bangunan masih ada yang terbilang kumuh atau kurang terawat karena letaknya yang berada di pojok.

4.	Kampung Kota Pelangi 200 tidak dilengkapi dengan sarana-prasarana kebakaran.	Berdasarkan hasil observasi lapangan, tidak ada sarana kebakaran yang memenuhi dalam satu kampung, oleh karena itu diperlukan kewaspadaan yang tinggi apabila terjadi kebakaran mengingat jarak antar bangunan yang berdekatan.
5.	Tidak ada penunjuk/arah titik evakuasi.	Tidak ada rambu ataupun penanda akan bahaya kebakaran, masyarakat ataupun wisatawan akan merasa kebingungan jika suatu saat terjadi kebakaran.
6.	Kepadatan penduduk yang tinggi yaitu sebesar 887 jiwa/hektar, sehingga banyak rumah yang tidak mendapat pencahayaan alami yang cukup.	Pencahayaan yang kurang berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat yang tinggal di dalamnya, perlu adanya renovasi terkait kebutuhan pencahayaan setiap bangunan, seperti pencahayaan yang berasal dari atap.
7.	Tidak ada lahan parkir umum.	Keterbatasan lahan membuat masyarakat Kampung Pelangi 200 hanya bisa memiliki kendaraan sejenis sepeda motor, dimana tempat penyimpanan sepeda motor berada di dalam rumah ataupun halaman masyarakat yang terbatas.
8.	Akses kendaraan bermotor hanya sampai di gerbang Kampung Pelangi 200.	Wisatawan tidak bisa membawa kendaraan jika ingin berkunjung karena akses yang terbatas, sehingga wisatawan hanya bisa berjalan kaki untuk dapat masuk ke dalam Kampung Pelangi 200.
9.	Kurangnya ruang terbuka publik atau ruang terbuka hijau.	Keterbatasan lahan menyebabkan tidak adanya ruang terbuka untuk sekedar berkumpul, setiap masyarakat hanya bisa berdiam diri di rumah atau rumah tetangga mereka jika ingin berkumpul/bersosialisasi.
10.	Kurangnya inovasi dan kesadaran masyarakat untuk memelihara program pemerintah demi meningkatkan kualitas wilayah tersebut.	Tingkat pendidikan masyarakat yang terbatas membuat kurangnya kesadaran untuk menjaga dan melestarikan program Kampung Pelangi 200.
11.	Banyaknya masyarakat yang merasa nyaman tinggal di wilayah kumuh karena sudah terbiasa.	Keterbatasan ekonomi membuat masyarakat terbiasa tinggal di tempat yang kumuh dan sulit untuk menyadarkan masyarakat agar bisa memperjuangkan kualitas tempat tinggal yang ada.
12.	Kesejahteraan ekonomi masyarakat relative masih rendah.	Mata pencaharian masyarakat yang kebanyakan masih terbatas membuat kesejahteraan ekonomi yang ada di Kampung Pelangi 200 relatif rendah.

c) Peluang

1.	Adanya program penanganan kawasan permukiman kumuh seperti Kotaku, serta bantuan dana investasi (BDI) dan program PIPPK di Kota Bandung yang dapat membantu meningkatkan kawasan tersebut.
2.	Pemerintah dan masyarakat, serta fasilitator dapat berkolaborasi untuk menangani kawasan tersebut dengan lebih efektif dan komprehensif.

d) Ancaman

1.	Alih fungsi lahan pemukiman kumuh menjadi kawasan industri atau komersial yang mampu menghasilkan nilai ekonomis yang lebih tinggi	Pengelolaan lahan kumuh menjadi lahan yang lebih bermanfaat seperti menjadikan lahan budidaya hidroponik.
2.	Deliniasi lahan kumuh tidak sesuai dengan administrasi yang ada.	Lakukan pemetaan ulang menggunakan teknologi dan metode yang tepat untuk memastikan deliniasi lahan kumuh sesuai dengan batas administrasi yang benar. Ini termasuk menggunakan citra satelit terbaru, pemetaan lapangan, dan validasi langsung di lapangan.
3.	Terbatasnya anggaran pemerintah untuk menyalurkan dana pemeliharaan terutama ke kampung yang sudah direvitalisasi, karena berfokus memberikan bantuan ke kampung kota yang belum direvitalisasi.	Pemerintah sebaiknya memberikan perhatian dan penyaluran dana secara terus menerus dengan membuat sesuatu yang memberikan nilai jual di Kampung Pelangi 200.
4.	Program perbaikan kampung kota sering kali tidak sejalan dengan keinginan masyarakat sehingga rentan terjadi konflik.	Lebih ditingkatkan komunikasi antar pemerintah dan masyarakat Kampung Pelangi 200 agar nantinya program yang akan dijalankan bisa sesuai dan tingkat keberhasilannya tinggi.
5.	Seringkali, program perbaikan infrastruktur dibiayai secara terpisah tanpa disertai rencana yang menyeluruh untuk pengembangan kawasan.	Dimulai dengan mengembangkan rencana master atau rencana tata ruang yang menyeluruh untuk pengembangan kawasan. Rencana ini harus mencakup visi jangka panjang untuk infrastruktur, pemukiman, transportasi, lingkungan, dan sektor lainnya yang relevan.
6.	Masyarakat masih merasa kurang dalam hal sosial-ekonomi terkait bantuan pemerintah.	Upayakan distribusi mitra penyalur bantuan sosial secara merata di seluruh wilayah. Solusi yang efektif perlu ditemukan untuk mengatasi kendala alur pendaftaran yang rumit dan keterbatasan anggaran serta kompetensi SDM pelaksana.
7.	Rendahnya tingkat keaktifan masyarakat untuk memelihara program perbaikan Kampung Pelangi 200.	Libatkan masyarakat secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Dengan mengadakan pertemuan rutin, pelatihan, dan diskusi terbuka, masyarakat akan merasa memiliki peran penting dalam keberhasilan program.
8.	Belum ada pihak eksternal yang membantu meningkatkan kualitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat terutama dalam aspek ekonomi dan sosial.	Sosialisasikan manfaat dan tujuan Program Kampung Pelangi 200 secara terus-menerus. Kampanye edukasi melalui media sosial, brosur, dan ceramah di lingkungan akan meningkatkan kesadaran masyarakat. Sehingga masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya secara mandiri.

4.4. Strategi Peningkatan Kualitas Lingkungan Kampung Pelangi 200

Setelah melakukan studi preseden terhadap Kampung Warna Warni Jodipan di Malang, serta Kampung Pelangi di Semarang, dan melakukan analisis SWOT Kampung Kota Pelangi 200, kemudian dibuat empat strategi, yaitu:

1. Strategi SO: memanfaatkan potensi untuk meraih peluang.
2. Strategi ST: memanfaatkan potensi untuk menghindari ancaman.
3. Strategi WO: meminimalisasi kelemahan untuk meraih peluang.
4. Strategi WT: meminimalisasi kelemahan untuk menghindari ancaman.

a) Strategi SO

1.	Merehabilitasi bangunan yang sudah tidak layak huni.	Banyaknya hunian yang tidak layak dan kumuh di Kampung Pelangi 200. Hal ini seharusnya menjadi fokus pemerintah Kota Bandung untuk memberikan dana atau bantuan untuk memperbaiki bangunan kumuh.
2.	Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas masyarakat dengan edukasi perekonomian, memberikan modal usaha untuk membuka usaha/jasa.	Pemerintah ataupun fasilitator dapat memberikan dana untuk modal usaha/jasa kepada masyarakat Kampung Pelangi 200. Dapat diambil contoh preseden Kampung Warna Warni Jodipan yang mengedukasi dan mengajak warganya untuk berjualan aksesoris, atau kedai makanan.
3.	Memberi tarif masuk kepada wisatawan untuk biaya pemeliharaan program peningkatan kualitas kawasan.	Banyaknya wisatawan dapat mendorong salah satu strategi ekonomi masyarakat setempat, yaitu dengan memberi tarif masuk. Tidak harus dipatok dengan harga tinggi, cukup seperti tempat-tempat wisata lain di Bandung yang cukup terjangkau, sehingga wisatawan tidak akan keberatan untuk membayar.
4.	Peningkatan kualitas masyarakat dengan edukasi program pemerintah tentang peningkatan kualitas lingkungan kampung kota.	Edukasi dari tim pelaksana dan pemerintah sangat dibutuhkan untuk peningkatan kualitas kampung kota. Edukasi kesehatan yang dilakukan oleh tim pelaksana Kampung Pelangi Semarang, atau edukasi kebersihan yang dilakukan tim dari Kampung warna Warni Jodipan berhasil membuat warga paham dan menerapkannya melalui pendekatan komunikasi yang halus.
5.	Mengajak partisipasi aktif masyarakat dalam keberlanjutan program peningkatan kualitas lingkungan Kampung Pelangi 200.	Tim pelaksana tentu tidak dapat melakukan program tanpa bantuan dari masyarakat setempat. Dengan komunikasi yang baik, tim pelaksana Kampung Warna Warni Jodipan dapat mengajak partisipasi aktif warga setempat serta pemeliharannya. Hal ini dapat menjadi contoh bagi Kampung Pelangi 200.

b) Strategi ST

1.	Peningkatan koordinasi pemerintah, masyarakat, tim pelaksana, dan fasilitator demi tercapainya program peningkatan kualitas kampung kota dengan baik.	Perlu adanya koordinasi antara pemerintah, masyarakat, tim pelaksana, dan fasilitator agar Kampung Pelangi 200 dapat menjalankan program kampung kota dengan baik dan terarah. Koordinasi ini akan meningkatkan kualitas kampung kota, Kampung Pelangi 200
----	---	--

2.	Peningkatan anggaran untuk program peningkatan kualitas kampung kota, baik yang belum direvitalisasi, maupun yang sudah (biaya pemeliharaan).	Untuk meningkatkan kualitas Kampung Pelangi 200, perlu adanya peningkatan anggaran untuk program-program yang ada. Dengan meningkatnya anggaran program-program ini dan juga pelaksanaan yang sesuai, kualitas kampung kota akan meningkat, baik fasilitas yang belum direvitalisasi, maupun yang sudah atau yang perlu anggaran untuk pemeliharaan.
3.	Bekerjasama dengan ahli atau pakar (penata ruang/arsitek, penata kota) demi berjalannya program dengan terintegrasi dan efisien.	Demi tercapainya kampung kota yang tertata sesuai dengan peraturan yang ada, peran arsitek/penata kota sangat penting. Bekerja sama dengan arsitek/penata kota akan menjadikan Kampung Pelangi 200 mencapai program dengan terintegrasi dan efisien.

c) Strategi WO

1.	Perbaiki infrastruktur di Kampung Kota Pelangi 200 yang tidak sesuai standar.	Memperbaiki infrastruktur di Kampung Kota Pelangi 200 memerlukan pendekatan yang terkoordinasi dan berkelanjutan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat lokal sendiri. Dengan demikian, dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik dan meningkatkan kualitas hidup bagi semua penduduk kampung tersebut.
2.	Pemeliharaan infrastruktur, sarana dan prasarana yang sudah baik atau sesuai standar	Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan juga sangat penting untuk memastikan bahwa kebutuhan dan masukan lokal terpenuhi dengan baik. Selain itu, pemeliharaan rutin dan pemantauan terhadap infrastruktur yang sudah ada juga diperlukan untuk memastikan bahwa mereka tetap berfungsi dengan baik dan aman bagi pengguna.
3.	Kegiatan edukasi masyarakat untuk pola hidup sehat dan kebersihan lingkungan, terutama lingkungan kumuh.	Sosialisasi pentingnya hidup sehat, kebersihan lingkungan, dan pengelolaan sampah diharapkan dapat membuat masyarakat lebih sadar akan pentingnya pola hidup sehat sehingga dapat menciptakan lingkungan yang nyaman bagi semua penduduk Kampung Pelangi 200.

4.	Penyuluhan kepada masyarakat agar masyarakat berinisiatif memelihara kelanjutan program-program perbaikan Kampung Pelangi 200.	Dengan adanya penyuluhan, diharapkan masyarakat Kampung Pelangi 200 dapat merasa memiliki tanggung jawab yang lebih besar terhadap keberlanjutan program-program perbaikan yang sudah dilakukan. Hal ini akan memastikan bahwa pencapaian yang telah dicapai tidak hanya sementara, tetapi dapat berlanjut dan memberikan manfaat jangka panjang bagi semua penduduk kampung tersebut.
----	--	--

d) Strategi WT

1.	Mencegah adanya kampung kumuh baru di sekitar kawasan tersebut karena terlalu fokus pada peningkatan kualitas lingkungan kawasan Kampung Pelangi 200.	Dengan menerapkan penguatan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, dan mengedukasi masyarakat, diharapkan dapat mengurangi risiko terbentuknya kampung kumuh baru di sekitar Kampung Pelangi 200 sambil tetap meningkatkan kualitas lingkungan dan hidup masyarakat secara keseluruhan.
2.	Mengurangi atau mencabut izin pembangunan non hunian di kawasan Kampung Pelangi 200.	Mengevaluasi ulang kebijakan pembangunan, merevisi peraturan zonasi, serta melakukan pengawasan yang ketat bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan tidak hanya menguntungkan secara ekonomi tetapi juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal.
3.	Menyusun tim dari masyarakat setempat serta tim pelaksana program yang didampingi oleh pemerintah untuk melaksanakan peningkatan kualitas kawasan kampung kota dengan terintegrasi, efisien, dan tidak tumpang tindih, sehingga tidak memicu konflik antar RW.	Dengan menyusun tim ini secara hati-hati dan mengintegrasikan pendekatan yang partisipatif, terkoordinasi, dan efisien, diharapkan dapat menghindari konflik dan mencapai tujuan peningkatan kualitas kawasan Kampung Pelangi 200 dengan baik.
4.	Meningkatkan peran pihak eksternal dalam peningkatan kualitas kawasan Kampung Pelangi 200.	Kolaborasi dengan organisasi non-pemerintah serta konsultasi dengan ahli dan akademisi diharapkan dapat meningkatkan sumber daya, kreativitas, dan dukungan yang diperlukan untuk mencapai perubahan positif yang signifikan bagi komunitas lokal tersebut.
5.	Membangun rumah susun bersubsidi terkait padatnya pemukiman Kampung Pelangi 200.	Membangun rumah susun bersubsidi di Kampung Pelangi 200 dapat menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kondisi pemukiman yang padat serta memberikan akses perumahan yang layak bagi masyarakat. Dengan perencanaan yang matang dan keterlibatan aktif dari masyarakat setempat, proyek ini dapat menjadi contoh pembangunan perumahan yang inklusif dan berkelanjutan.

e) Rincian Strategi

1. Aspek Fisik Lingkungan

a.	Perumahan, Bangunan Rumah	<ul style="list-style-type: none"> • Membangun hunian vertikal bersubsidi sebagai solusi akan padatnya Kampung Pelangi 200. • Menyediakan perumahan formal untuk masyarakat Kampung Pelangi 200 dengan harga yang terjangkau. • Mengawasi pembangunan perumahan swadaya oleh masyarakat Kampung Pelangi 200. • Memprioritaskan penanganan rumah-rumah kumuh di Kampung Pelangi 200 yang rawan bencana dan juga kawasan strategis.
----	---------------------------	---

2. Aspek Regulasi, Kelembagaan, dan Pembiayaan

a.	Legalitas Lahan	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan penertiban dan penataan rumah-rumah yang dibangun secara ilegal tanpa harus disertai pengurusan. • Melakukan inventarisasi dan memberikan prosedur sertifikasi tanah bagi masyarakat Kampung Pelangi 200 yang belum memiliki sertifikat tanah.
b.	Kelembagaan dan Regulasi Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> • Menjalin kerjasama antara pemerintah dan warga Kampung Pelangi 200 agar program perbaikan kampung dan infrastruktur dapat direalisasikan dengan benar. • Melakukan evaluasi pada Kampung Pelangi 200 secara berkala sehingga dapat memberikan bantuan perbaikan kawasan. • Mengoptimalkan pemanfaatan infrastruktur yang ada di Kampung Pelangi 200. • Melakukan pemerataan dalam pemberian bantuan/program baik fisik maupun sosial.
c.	Pembiayaan	<p>Memberikan program perbaikan pada Kampung Pelangi 200 secara efektif, efisien, dan tepat sasaran.</p> <p>Melakukan optimalisasi dan peningkatan anggaran pada Kampung Pelangi 200.</p> <p>Mencari sumber pendanaan dan berkolaborasi untuk meningkatkan kualitas hidup di Kampung Pelangi 200.</p>
d.	Peran Komunitas	<p>Meningkatkan kapasitas dan peran komunitas pada Kampung Pelangi 200 sebagai penghubung pemerintah dan masyarakat.</p> <p>Mengajak masyarakat Kampung Pelangi 200 untuk berpartisipasi dalam penataan kawasan.</p>

5. Kesimpulan

Kampung kota memiliki peranan yang vital dalam konteks pembangunan berkelanjutan, menjadi respons masyarakat terhadap kebutuhan perumahan di lingkungan perkotaan. Namun, seringkali kampung kota menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kepadatan penduduk yang tinggi hingga kekurangan infrastruktur. Meskipun demikian, penting untuk diakui bahwa kampung kota juga merupakan pusat aktivitas ekonomi yang dinamis, dengan latar belakang sosial yang kompleks.

Dengan memperbaiki infrastruktur dan meningkatkan kualitas hidup di kampung kota, kita tidak hanya membantu meningkatkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat lokal, tetapi juga berkontribusi pada upaya pembangunan berkelanjutan secara keseluruhan. Dengan demikian, penelitian ini memiliki implikasi penting dalam merancang strategi pembangunan yang lebih baik

di masa depan, dengan penekanan pada perbaikan infrastruktur dan peningkatan kualitas hidup sebagai komponen penting dalam pembangunan berkelanjutan. Gambaran yang komprehensif tentang potensi, kendala, peluang, dan ancaman yang dihadapi oleh Kampung Kota Pelangi 200. Potensi dan kekuatan seperti gotong royong masyarakat, daya tarik wisatawan, dan kesadaran lingkungan yang baik menunjukkan fondasi yang kuat untuk pembangunan yang berkelanjutan. Namun, kendala seperti kepadatan penduduk yang tinggi, kurangnya infrastruktur, dan kekurangan lahan parkir menjadi tantangan yang harus diatasi.

Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi sejumlah kelemahan, seperti ketidaksesuaian Garis Sempadan Bangunan (GSB), kurangnya daerah resapan air hujan, dan masih adanya bangunan kumuh. Sarana-prasarana kebakaran yang tidak memadai, kurangnya ruang terbuka publik, dan tingginya kepadatan penduduk juga menjadi kendala. Di sisi lain, peluang dari program penanganan kawasan permukiman kumuh dan kolaborasi efektif antara pemerintah dan masyarakat dapat membantu meningkatkan kawasan ini. Ancaman seperti alih fungsi lahan dan terbatasnya anggaran pemerintah memerlukan perhatian khusus. Penelitian ini menghasilkan empat strategi utama untuk meningkatkan kualitas Kampung Kota Pelangi 200: Strategi SO untuk memanfaatkan potensi meraih peluang, Strategi ST untuk menghindari ancaman, Strategi WO untuk mengatasi kelemahan demi meraih peluang, dan Strategi WT untuk meminimalisasi kelemahan dalam rangka menghindari ancaman. Implementasi dari strategi-strategi ini meliputi rehabilitasi bangunan, peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui edukasi dan modal usaha, peningkatan koordinasi antara pemangku kepentingan, serta pembangunan infrastruktur yang sesuai standar.

6. Saran

Untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat di Kampung Kota Pelangi 200, beberapa saran dapat diimplementasikan. Pertama, pemerintah harus memberikan prioritas tinggi pada rehabilitasi bangunan yang tidak layak huni dan membangun hunian vertikal bersubsidi untuk mengatasi kepadatan dan kondisi bangunan kumuh. Kedua, peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat dapat dicapai melalui edukasi perekonomian dan pemberian modal usaha untuk membuka usaha atau jasa. Selain itu, tarif masuk bagi wisatawan dapat diberlakukan untuk biaya pemeliharaan program peningkatan kualitas kawasan. Ketiga, edukasi mengenai program pemerintah tentang peningkatan kualitas lingkungan kampung kota harus ditingkatkan, serta mengajak partisipasi aktif masyarakat dalam keberlanjutan program ini. Keempat, perlu adanya peningkatan koordinasi antara pemerintah, masyarakat, tim pelaksana, dan fasilitator demi tercapainya program peningkatan kualitas kampung kota yang terintegrasi dan efisien. Kelima, perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur yang sesuai standar harus dilakukan secara rutin, serta kegiatan edukasi masyarakat untuk pola hidup sehat dan kebersihan lingkungan harus ditingkatkan. Terakhir, upaya untuk mencegah terbentuknya kampung kumuh baru di sekitar kawasan Kampung Pelangi 200 harus dilakukan, termasuk mengurangi atau mencabut izin pembangunan non-hunian dan meningkatkan peran pihak eksternal dalam program peningkatan kualitas kawasan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Kampung Pelangi 200 dapat menjadi kawasan yang lebih baik dan memberikan kualitas hidup yang lebih baik bagi seluruh penduduknya.

Referensi

1. Ade, W., & Iwan, K. (2019). Strategi Peningkatan Kualitas Kampung Kota Pada Program Kampung Kreatif Dan Bebas Sampah Di Kampung Dago Pojok Dan Kampung Bandung Kidul. *Jurnal Plano Madani*. VOLUME 8 NOMOR 1.

2. Damayanti, R. 2012. Studi Struktur Kota Dan Landmark Surabaya, Oleh Mahasiswa Semester 7 Jurusan Arsitektur Uik Petra. Laporan Penelitian. Jurusan Arsitektur, Universitas Kristen Petra.
3. Fatimah, W. M., Sarli, P. W., Soewondo, P., & Zakiyya, N. M. (2020, November). Strategic thinking to improve sanitation in Kampung Pelangi 200, Bandung City: in comparison with Kampung Jodipan-Ksatrian, Malang City. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 592, No. 1, p. 012018). IOP Publishing.
4. Hasbullah, R. A. (2021). *TA: IDENTIFIKASI SENSE OF PLACE PADA PERMUKIMAN PADAT PENDUDUK (STUDI KASUS: KAMPUNG PELANGI 200, KELURAHAN DAGO, KECAMATAN COBLONG)* (Doctoral dissertation, Institut Teknologi Nasional Bandung).
5. Iwan Kustiwan, & Afrizal Ramadhan. 2019. “Strategi Peningkatan Kualitas Lingkungan Kampung-Kota dalam Rangka Pembangunan Kota yang Inklusif dan Berkelanjutan: Pembelajaran dari Kasus Kota Bandung.” *Journal of Regional and Rural Development Planning* Februari 2019, 3 (1): 64-84.
6. Kustiwan, I. 2014. “Keberlanjutan Kampung Kota Dalam Strategi Regenerasi Perkotaan Studi Kasus: Kawasan Pusat Kota Bandung.” Bandung: Laporan Akhir Penelitian (Riset) Inovasi ITB, Program Studi Perencanaan dek Wilayah dan Kota, SAPPK-ITB
7. Nugroho, A. C. (2009). Kampung Kota Sebagai Sebuah Titik Tolak Dalam Membentuk Urbanitas Dan Ruang Kota Berkelanjutan, *Jurnal Rekayasa*, 13 (13), 209-2018
8. Setiawan, B. 2010. Naskah Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Dalam Ilmu Perencanaan Kota Universitas Gadjah Mada “*Kampung Kota dan Kota Kampung: Tantangan Perencanaan Kota di Indonesia*”. Universitas Gadjah Mada.
9. Setiawan, B., & Haryadi. (2002). Penyusunan Indikator-Indikator Kota Di Indonesia. *Jurnal Manusia dan Lingkungan*. 9 (3), 115-125.
10. Sujarto, & Djoko. (1992). Perkembangan Perencanaan Tata Ruang Kota Di Indonesia, Bandung: Planologi ITB
11. Widjaja, P. (2014). Kampung-Kota Bandung. Graha Ilmu